

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM ALOKASI PEMERIKSAAN TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP

1. Menerima Daftar Wajib Pajak Besar dan Menengah yang akan dilakukan pemeriksaan dari Direktorat P4.
2. Meneliti status SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar tersebut (Lebih Bayar, Rugi atau status lainnya). Penelitian atas SPT Tahunan PPh mulai dilakukan pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2001.
3. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi maka pelaksanaan pengawasan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut dimasukkan ke dalam kriteria pemeriksaan Lebih Bayar atau Rugi. Penentuan UP3 terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi dilakukan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.
4. Meneliti apakah terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau belum (penelitian tahun pajak yang diperiksa dimulai dari tahun pajak 2001). Daftar pada angka 1 (satu) mencantumkan data LP2 jika telah terbit namun karena masih terdapat pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa LP2 maka perlu dilakukan penelitian kembali.
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan untuk masing-masing Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Wajib Pajak Besar yang terpilih untuk diperiksa harus dilakukan pemeriksaan yang mencakup seluruh jenis pajak melalui Pemeriksaan Lengkap.
 - b. Pada prinsipnya, untuk Wajib Pajak Menengah juga harus dilakukan pemeriksaan yang mencakup seluruh jenis pajak, namun apabila berdasarkan pertimbangan Tim Alokasi Kanwil ternyata hal tersebut tidak memungkinkan maka Tim Alokasi Kanwil dapat menentukan lain.
Penentuan ruang lingkup pemeriksaan untuk Wajib Pajak Menengah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - Jumlah peredaran usaha;
 - Jumlah PPh terutang;
 - Profit Margin;
 - Jumlah cabang atau lokasi;
6. Perluasan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang menyatakan rugi dan belum diperiksa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.
7. Mengirimkan daftar Wajib Pajak Besar dan Menengah yang telah ditentukan UPPP-nya kepada masing-masing unit dengan tembusan kepada Direktur P4 untuk diterbitkan LP2-nya.
8. Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar dan Menengah.

CONTOH PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK

1. Persiapan
 - i. Mempelajari berkas dan data Wajib Pajak yang ada di KPP;
 - ii. Mempelajari berkas tunggakan pajak;
 - iii. Mempelajari Laporan Pemeriksaan Pajak tahun-tahun sebelumnya;
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Lakukan pemeriksaan atas eksistensi dari pada harta yang dimiliki Wajib Pajak.
 - b. Perhatikan mutasi aktiva yang terjadi sejak periode tunggakan sampai tahun berjalan.
 - c. Lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait misalnya bank yang berkenaan dengan Rekening Koran.
 - d. Periksa mutasi investasi sementara (marketable securities) dan investasi jangka panjang (saham dan obligasi).
 - e. Periksa daftar rincian piutang usaha dan piutang di luar usaha.
 - f. Lakukan pemeriksaan atas daftar persediaan tahun berjalan.
 - g. Lakukan pemeriksaan atas harta tak bergerak yang dimiliki Wajib Pajak.
 - h. Dapatkan bukti-bukti kepemilikan semua harta tak bergerak yang dimiliki Wajib Pajak.
3. Pelaporan

Walaupun pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lapangan yang melekat, pelaporan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak dilakukan dengan LPP khusus yang tidak merupakan bagian dari LPP pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lapangan.

LPP pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak mencakup hal-hal sebagai berikut:

 - a. Penugasan Pemeriksaan
 - b. Identifikasi Wajib Pajak/Penanggung Pajak
 - c. Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak
 - d. Daftar Lampiran

LAPORAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK

Nomor : (i)
Tanggal : (ii)

A. PENUGASAN PEMERIKSAAN

- 1. Instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
- 2. Tim Pemeriksa
 - a. Ketua Kelompok : (Nama/NIP)
 - b. Ketua Tim : (Nama/NIP)
 - c. Anggota Tim :
 - 1. (Nama/NIP)
 - 2. (Nama/NIP)
- 3. Tanggal mulai Pemeriksaan :
- 4. Tanggal selesai Pemeriksaan :

B. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak/Penanggu Pajak :
- 2. N P W P :
- 3. Bentuk Usaha :
- 4. Alamat dan Nomor Telepon :
 - a. Kantor Pusat/Tempat Usaha :
 - b. Cabang (Perwakilan) :
 - c. Pabrik (Unit Usaha Lain) :
- 5. Status Permodalan :
 - [] PMA [] PMDN
 - [] BUMN [] BUMD
 - [] Swasta Lainnya
- 6. Status Badan :
 - [] Pusat [] Tanggal
 - [] Cabang [] BUT
- 7. Jenis Pajak Yang Menjadi Kewajiban :
 - [] PPh Badan
 - [] PPh Pasal 21
 - [] PPh Pasal 22
 - [] PPh Pasal 23
 - [] PPh Pasal 26
 - [] PPN/PPnBM
 - [] PBB
 - [] BPHTB
- 8. Permodalan dan Daftar Pemegang Saham
 - a. Permodalan
 - Modal Statuter : Rp. terdiri saham @ Rp.
 - Modal ditempatkan : Rp.
 - Modal disetor : Rp.

b. Daftar Pemegang Saham

NO	NAMA DAN NPWP	ALAMAT	JUMLAH SAHAM YANG DISETOR		%	KET.
			SAHAM	NILAI NOMINATOR		
1						
2						
3						

9. Pengurus

a. Dewan Direksi

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1				
2				
3				

b. Komisaris

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1				
2				
3				

10. Tunggakan Pajak

No.	NAMA DAN TANGGAL skp DAN STP	JUMLAH TUNGGAKAN	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN
1				
2				
3				
...				

11. Laporan Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak terdahulu
- a. Nomor :

b. Tanggal :

C. DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK

NO	URAIAN	JUMLAH	TAKSIRAN NILAI	BUKTI KEPEMILIKAN
1.				
2.				
3.				
....				
	JUMLAH			

D. DAFTAR LAMPIRAN

--

KETUA KELOMPOK
(SUPERVISOR)
PEMERIKSA,

.....
NIP.

.....
KEPALA KARIKPA/BIDANG/
SUBDIT

.....
NIP.

..... 20.....
KETUA TIM

.....
NIP.

ANGGOTA TIM
PEMERIKSA

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan
Jakarta
Tromol Pos

Telepon :
Fax :

Telex :
Nomor :2002
Sifat :
Lampiran : Laporan Kemajuan Pemeriksaan Kasus
Hal : a.n

Kepada Yth. Direktur Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak
di

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kemajuan Pemeriksaan Kasus a.n.		Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-...../PJ/2002 tanggal Tentang Laporan Kemajuan Pemeriksaan Kasus



Kepala Kantor
Tanda tangan

Nama Terang
NIP.

Tembusan:
Kepala Kanwil DJP...



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan
Jakarta
Tromol Pos

Telepon :
Fax :
Telex :

LAPORAN KEMAJUAN PEMERIKSAAN KASUS

NAMA WAJIB PAJAK : XXXX
N P W P : 00.000.000.0-000
ALAMAT : Jl. YYYY, Jakarta
TAHUN PAJAK : 2000
PERIODE LAPORAN/KE- : (bulan) 2002/KE-1

LATAR BELAKANG :

Diisi dengan :
1. Uraian mengenai alasan dilakukannya pemeriksaan termasuk didalamnya resume kasus;
2. Gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak;



KETENTUAN FORMAL :

Diisi dengan :
1. Nomor dan Tanggal Instruksi Pemeriksaan;
2. Nomor dan Tanggal SPPP;
3. Nomor dan Tanggal Peminjaman Berkas;
4. Penyelenggaraan Perangkat Pembukuan Wajib Pajak (Audited/Unaudited), Manual/Komputerisasi);
5. Kelengkapan Dokumen Pembukuan;
6. Kelengkapan Dokumen Non-finansial;



MODUS OPERANDI

Diisi dengan :
1. Mekanisme atau cara kerja Wajib Pajak dalam upaya menghindari kewajiban pajaknya disertai dengan bagan arus terjadinya kasus;
2. Pihak-pihak yang tersangkut dalam mata rantai usaha Wajib Pajak;



PELAKSANAAN PEMERIKSAAN :

Diisi dengan :

1. Prosedur dan teknik pemeriksaan yang telah dilakukan;
2. Hasil Pemeriksaan sementara:
 - a. Dokumen pendukung atau keterangan/alat bukti yang sudah dikumpulkan;
 - b. Permintaan data/keterangan kepada Wajib Pajak;
 - c. Permintaan data/keterangan kepada pihak ketiga;
 - d. Data/keterangan dari KPP
 - e. Temuan sementara
3. Kesulitan atau hambatan yang dihadapi;



KESIMPULAN :

Diisi dengan :

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
2. Cukup tidaknya bukti tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Usulan tindak lanjut.

TEMPAT, TGL PEMBUATAN LAPJU

CONTOH :

JAKARTA, 12 JULI 2002

TIM PEMERIKSA :

NO URUT, NAMA, JABATAN

CONTOH :

1. AAA, SUPERVISOR
2. BBB, KETUA TIM
3. CCC, ANGGOTA

CONTOH :

1.
2.
3.

TANDA TANGAN

Mengetahui,
Kepala Kantor

Nama

NIP

Catatan:

Uraian pada masing-masing butir disesuaikan dengan tahapan kemajuan yang dibuat.

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK
Wajib Pajak Badan

Nomor : (i)
Tanggal : (ii)

I. UMUM

A. PENUGASAN PEMERIKSAAN

- 1. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor :
Tanggal :
- 2. Tim Pemeriksa
a. Ketua Kelompok : (Nama/NIP)
b. Ketua Tim : (Nama/NIP)
c. Anggota Tim : 1. (Nama/NIP)
2. (Nama/NIP)
- 3. No. LP-2 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- 4. Tahun Pajak : [] [] [] [] []
- 5. Penugasan Pemeriksaan : [] []
- 6. Kelompok SPT yang diperiksa : [] []
- 7. Alasan Pemeriksaan : [] []
- 8. Tanggal mulai Pemeriksaan :
- 9. Tanggal selesai Pemeriksaan :
- 10. Jam Pemeriksaan :
- 11. Pemberitahuan perpanjangan :

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN	NO. SURAT	TGL. JATUH TEMPO	KET.
Pemberitahuan			
Permohonan Pertama			
Permohonan Kedua			

B. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. N P W P :
- 3. Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP :
- 4. Bentuk Usaha :
- 5. Alamat dan Nomor Telepon :
a. Kantor Pusat/Tempat Usaha :
b. Cabang (Perwakilan) :
c. Pabrik (Unit Usaha Lain) :
- 6. Status Permodalan : [] PMA [] PMDN
[] BUMN [] BUMD
[] Swasta Lainnya
- 7. Status Badan : [] Pusat [] Tanggal
[] Cabang [] BUT
- 8. Klasifikasi Lapangan Usaha
a. SPT : [] [] [] [] [] []
b. Pemeriksa : [] [] [] [] [] []
- 9. Jenis Pajak Yang Menjadi Kewajiban : [] PPh Badan
[] PPh Pasal 21
[] PPh Pasal 22
[] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 26
[] PPN/PPnBM
[] PBB
[] BPHTB
- 10. Penanggung Jawab
- Nama :
- Jabatan :
- Alamat dan Nomor Telepon :
- 11. Pendirian
a. Tanggal dan Tempat Pendirian :
Akte Notaris :
Nomor :
b. Akte Perubahan (terakhir)
Tanggal :
Notaris :
Nomor :
Perihal/Tentang :

12. Permodalan dan Daftar Pemegang Saham

- a. Permodalan
Modal Statuter : Rp. terdiri saham
@ Rp.
Modal ditempatkan : Rp.
Modal disetor : Rp.

b. Daftar Pemegang Saham

NO	NAMA DAN NPWP	ALAMAT	JUMLAH SAHAM YANG DISETOR		%	KET.
			SAHAM	NILAI NOMINATOR		
1						
2						
3						

c. Daftar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa

No.	NAMA DAN NPWP	ALAMAT	KETERANGAN
1			
2			
3			
.			

d. Data Debt Equity Ratio (DER)

No.	JENIS HUTANG	JENIS MODAL	RATIO	KETERANGAN
1				
2				
3				
.				

13. Pengurus

a. Dewan Direksi

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1				
2				
3				
.				

b. Komisaris

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1				
2				
3				
.				

C. PEMBUKUAN WAJIB PAJAK :

1. Metode Pembukuan : [] Kas [] Akrua
2. Proses Pembukuan : [] Manual [] Electronic Data Processing
3. Tahun Buku : Mulai s.d.
4. Laporan Keuangan disusun/diaudit : [] Disusun sendiri
[] Kantor Akuntan Publik
.....
Nama Akuntan :
.....
No. Reg.
Pendapat Akuntan :
.....

5. Pendapat Pemeriksa mengenai pembukuan Wajib Pajak

.....
.....

D. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan : [] Dilaksanakan sendiri
[] Konsultan Pajak
Nama Konsultan Pajak :
No. Surat Izin Kerja :

2. Ketaatan Pemasukan SPT
- SPT Tahunan
-

PPh WP Badan :[] Tepat waktu

[] Tidak Tepat waktu Tgl.....

Tgl.....

Tgl.....

-

[] Tidak Disampaikan Tgl.....

PPh Pasal 21

: []

Tepat waktu

[] Tidak Tepat waktu Tgl.....

[] Tidak Disampaikan Tgl.....

- SPT Masa

-

PPh Pasal 21

: []

Tepat waktu

....bulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disampaikanbulan

-

PPN/PPnBM

: []

Tepat waktu

....bulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disampaikanbulan

3. Ketaatan pembayaran/setoran masa

- PPh Pasal 25

:

[] Tepat waktubulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Dibayarbulan

- PPh Pasal 21

:

[] Tepat waktubulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disetorbulan

- PPh Pasal 22

:

[] Tepat waktubulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disetorbulan

- PPh Pasal 23

:

[] Tepat waktubulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disetorbulan

- PPh Pasal 26

:

[] Tepat waktubulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disetorbulan

- PPN/PPnBM

:

[] Tepat waktubulan

[] Tidak Tepat waktubulan

[] Tidak Disetorbulan

4. Tunggakan Pajak

NO	NAMA DAN TANGGAL skp DAN STP	JUMLAH TUNGGAKAN	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN
1				
2				
3				
....				

5. Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu

a. No. LPP :

b. Tanggal LPP :

E. DATA / INFORMASI YANG TERSEDIA

F. DAFTAR LAMPIRAN

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. GAMBAR KEGIATAN USAHA

B. GAMBAR SISTEM AKUNTANSI

1. Pengendalian Intern

2. Sistem Akuntansi

C. DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAM

NO	NAMA BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG DIPINJAM	KETERANGAN
1		

www.peraturanpajak.com

Page : 10

info@peraturanpajak.com

2		
3		
...		

D. MATERI YANG DIPERIKSA

- Pemanfaatan Data
- Objek PPh Badan
- Peredaran Usaha
- Harga Pokok Penjualan
- Penghasilan Lain dari Luar Usaha
- Pengurangan Penghasilan Bruto
- Objek PPh Pasal 21
- Objek PPh Pasal 22
- Objek PPh Pasal 23
- Objek PPh Pasal 26
- DPP PPN/PPnBM
- PBB
- BPHTB
- Kredit Pajak
- Kompensasi Kerugian

E. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemanfaatan data/alat keterangan (KKP-Data)

- KP Data-9
- Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan :

- Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau
- Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya Pajak terutang

2. PPh Badan

2.1 Peredaran Usaha (KKP B-1)

- Pengujian bersumber dari, misalnya :
- Buku besar penjualan dan faktur penjualan
 - Arus piutang atau arus barang
 - Equalisasi Peredaran Usaha PPh dengan Penyerahan menurut PPN
 - Dan dokumen lainnya (PEB, Bill of Lading, Letter of Credit)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Penjualan ekspor			
Penjualan lokal			
Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan Koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.2 Harga Pokok Penjualan (KKP B-2)

2.2.1 Pembelian bahan baku (KKP B-2-1)

- Pengujian bersumber dari :
- Buku pembelian, faktur pembelian
 - Arus hutang atau barang
 - Dan dokumen atau barang

2.2.2 Persediaan (KKP B-2-2)

- Pengujian bersumber dari :
- Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
 - Kartu persediaan
 - Arus barang

2.2.3 Penyusutan (KKP B-2-3)

- Pengujian bersumber dari :
- Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
 - Dasar aktiva
 - Bukti pembelian aktiva

2.2.4 Upah Langsung (KKP B-2-4)

- Pengujian bersumber dari :
- Kas/bank
 - Buku besar biaya
 - Daftar besar biaya

2.2.5 BPTL lainnya (KKP B-2-5)

Pengujian bersumber dari :
- Kas/bank
- Buku besar biaya
- Bukti pendukung lainnya
Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Pembelian bahan baku dan pembantu - Persediaan - Penyusutan - Upah langsung - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3 Pengurang Penghasilan Bruto (KKP B-3)
2.3.1 Biaya Penjualan (KKP B-3-1)

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Bukti Pendukung Lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Promosi - Biaya Pengemasan - Biaya Perjalanan - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.2 Biaya Umum dan Administrasi (KKP B-3-2)

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Bukti Pendukung Lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Gaji - Alat Tulis - Biaya Listrik - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.3 Biaya lain-lain (KKP B-3-3)

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Bunga - Biaya Administrasi bank - Kerugian dari penjualan/ Perolehan harta - Dan lain-lain			

Jumlah			
--------	--	--	--

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.4. Penghasilan dari Luar Usaha (KKP B-4)

- Pengujian bersumber dari :
- Kas/bank
 - Buku besar biaya
 - Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Bunga - Dividen - Sewa - Keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

3. PPh Pasal 21 (KKP E-1)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa/Tahunan PPh Pasal 21
 - Daftar gaji/upah
 - Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Gaji - Tunjangan - Pesangon - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4. PPh Pasal 22 (KKP E-2)

- Pengujian bersumber dari :
- Buku kas bank
 - Buku penjualan
 - Buku piutang
 - Uang muka pada pos neraca

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Belanja Barang - Impor Barang - Dan sebagainya			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5. PPh Pasal 23 (KKP E-3)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa
 - Hutang lain-lain
 - Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Dividen - Bunga - Royalty - Jasa - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6. PPh Final (KKP E-4)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa
 - Perjanjian perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
 - Hutang lain-lain di pos neraca
 - Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Diskonto/Bunga Obligasi Pengalihan Hak T/B Persewaan Tanah/Bang. Bunga Deposito Tabungan Jasa Giro Diskonto SBI Hadiah Undian Saham dan Obligasi di BEJ Penjualan Saham Pendiri Penj. Saham Modal Ventura Jasa Konstruksi Jasa Pelayaran Dalam Negeri Jasa Pelayaran Penerbangan LN Jasa Penerbangan DN Penghasilan Per. Dagang LN Pola Bagi Hasil Kerjasama Bentuk BOT Revaluasi Aktiva Tetap			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7. PPh Pasal 26 (KKP E-5)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa
 - Perjanjian perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
 - Hutang lain-lain di pos neraca
 - Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Dividen - Bunga - Jasa - Laba setelah Pajak BUT - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8. PPN/PPn BM (KKP E-6)

8.1 PPN Dalam Negeri/Impor (KKP E-6-1)

Pengujian bersumber dari :

- SPT Masa PPN
- Buku Kas/Bank
- Buku penjualan dan pembelian
- Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
- Buku Piutang dan hutang
- Uang muka pada pos neraca
- Buku penghasilan lain-lain
- Equalisasi dengan peredaran usaha di PPh Badan

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Penjualan ekspor - Penyerahan bukan ekspor - Retur penjualan			
Jumlah			
DPP PPN Masukan : - Pembelian impor - Pembelian local - Retur pembelian			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.2 PPN Jasa Luar Negeri (KKP E-6-2)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank
 - Buku Penjualan dan pembelian
 - Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
 - Buku Piutang dan hutang
 - Uang muka pada pos neraca
 - Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Royalty - Biaya Jasa, Komisi - - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan Koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.3 PPnBM Dalam Negeri (KKP E-6-3)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank
 - Buku Penjualan dan pembelian
 - Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
 - Buku Piutang dan hutang
 - Uang muka pada pos neraca
 - Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Kendaraan Bermotor - Selain Kendaraan Bermotor - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan Koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.4 PPnBM Dalam Negeri (KKP E-6-4)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank

- Buku Penjualan dan pembelian
- Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
- Buku Piutang dan hutang
- Uang muka pada pos neraca
- Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Kendaraan Bermotor			
- Selain Kendaraan Bermotor			
- Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan Koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

9. PBB (KKP E-7)

Pengujian bersumber dari :

- SPT PBB
- Buku Kas/Bank

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Tanah			
- Bangunan			
- Tanah dan Bangunan			
- Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan Koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

10. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (KKP E-8)

Pengujian bersumber dari :

- Buku Kas/Bank
- Akta Perolehan hak atas tanah dan bangunan
- Daftar Aktiva
- Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Tanah			
- Bangunan			
- Tanah dan Bangunan			
Jumlah			

Penjelasan Koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

11. Kredit Pajak (KKP E-9)

Pengujian bersumber dari :

- Surat Sertoran Pajak (lembar kedua)
- Bukti pemotongan/pemungutan
- Konfirmasi kepada Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
1. PPh Badan a. PPh Pasal 22 b. PPh Pasal 23 c. PPh Pasal 24 d. PPh Pasal 25 e. PPh Pasal 29 2. PPh Pasal 21 3. PPh Pasal 22 4. PPh Pasal 23 5. PPh Pasal 26 6. PPN a. Pajak Masukan Impor b. Pajak Masukan Dalam Negeri c. Pajak Masukan dari masa Pajak yang tidak sama d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu e. Lain-lain f. Dikurangkan pembayaran 7. Pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA 8. PPnBM 9. PBB 10. BPHTB			
Jumlah			

12. **Kompensasi Kerugian** **(KKP E-10)**
- Uraikan kerugian yang masih boleh dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak yang sedang diperiksa dengan memperhatikan surat ketetapan Pajak atas kerugian tersebut.

III. IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

A. IKHTISAR KOREKSI

1. Objek PPh Badan

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

2. Objek PPh Pasal 21

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

3. Objek PPh Pasal 22

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

4. Objek PPh Pasal 23

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

5. **Objek PPh Final**

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

6. **Objek PPh Pasal 26**

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

7. **Objek PPN**

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

8. **Objek PPnBM**

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

9. **Objek PBB**

NO	OBJEK		SPPT	SSP	PENANGGUNG PAJAK
	JENIS	LOKASI			

10. **Objek BPHTB**

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

B. **PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG/ MENURUT PEMERIKSA**

NO.	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Badan	
2.	PPh Pasal 4 ayat (2)	
3.	PPh Pasal 21	
4.	PPh Pasal 23	
5.	PPh Pasal 26	
6.	PPN/PPnBM	
7.	PBB	
8.	BPHTB	
	JUMLAH	

C. **PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG**

1. **PPh Badan**

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP
Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp
Rp

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksaan	Rp
Pengenaan Pajak (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :	
- % = Rp	
- % = Rp	
- % = Rp	
Jumlah Pajak terutang	Rp
Kredit Pajak	<u>Rp</u>
PPh lebih/kurang bayar	Rp
 2. PPh Pasal 21	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp
PPh Pasal 21 yang dibayar	<u>Rp</u>
PPh Pasal 21 lebih/kurang bayar	Rp
 Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):	
- Bunga	
..... % bulan x Rp	Rp
- Kenaikan	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh yang masih harus dibayar	Rp
 3. PPh Pasal 22	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp
PPh Pasal 22 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :	
..... % bulan x Rp	Rp
PPh Pasal 22 yang dibayar	<u>Rp</u>
PPh Pasal 22 lebih/kurang bayar	<u>Rp</u>
 Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):	
- Bunga	
..... % x bulan x Rp	Rp
- Kenaikan	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh yang masih harus dibayar	Rp
 4. PPh Pasal 23	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp
PPh Pasal 23 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh Pasal 23 yang disetor	<u>Rp</u>
PPh Pasal 23 lebih/kurang bayar	<u>Rp</u>
 Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):	
- Bunga	
..... % bulan x Rp	Rp
- Kenaikan	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh yang masih harus dibayar	<u>Rp</u>
 5. PPh Final	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp
PPh Final yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh Final yang disetor	<u>Rp</u>
PPh Final lebih/kurang bayar	<u>Rp</u>
 Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):	
- Bunga	
..... % bulan x Rp	Rp
- Kenaikan	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh yang masih harus dibayar	Rp
 6. PPh Pasal 26	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp
PPh Pasal 26 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :	
..... % x Rp <u>Rp</u>	
PPh Pasal 26 yang disetor	<u>Rp</u>
PPh Pasal 26 lebih/kurang bayar	<u>Rp</u>

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):

- Bunga

..... % x bulan x Rp

Rp
- Kenaikan

..... % x Rp

Rp
- PPH yang masih harus dibayar

Rp

7. PPN/PPnBM

7.1 PPN

- Jumlah Penyerahan Kena Pajak :

DPP
Ekspor Rp

- a.
- b. Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan, ditanggung Pernerintah dan lain-lain
- Rp
- c. Penyerahan yang PPN-nya

- dengan tarif umum 10%
- Rp
- dengan tarif efektif ... %
- Rp

Jumlah Penyerahan Kena Pajak

- Jumlah Pajak Keluaran :

DPP PPN

- a. Pajak Keluaran Seluruhnya:
- dengan tarif umum 10%
- Rp
- dengan tarif efektif ... %
- Rp
- b. Dikurangi retur penjualan
- Rp
- c. Dikurangi Pajak Keluaran
- ex. Keppres No.56/1998
- Rp

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut

Rp

- Kredit Pajak Pertambahan Nilai.

- a. Pajak Masukan Impor
- Rp
- b. Pajak Masukan Dalam Negeri
- Rp
- c. Pajak Masukan dari Masa#Pajak

yang Rp Rp

- tidak sama
- d. Kompensasi kelebihan PPN#bulan lalu
- Rp
- e. Lain-lain
- Rp
- f. Kompensasi pembayaran pendahuluan/ pengembalian oleh Bapeksta
- Rp

Jumlah Kredit PPN

Rp

Palak yang kurang/lebih dibayar :

- a. Penyerahan Kena Pajak
- Rp
- b. Pajak Keluaran
- Rp
- c. Kredit PPN
- Rp

Pajak yang kurang/lebih dibayar

- d. Denda (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- % x bulan x Rp
- Rp

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

7.2 PPnBM

Penyerahan Dalam Negen dan Ekspor :

DPP

- a. Dikenakan tarif 0% (Ekspor)
- Rp
- b. Dikenakan tarif 10%
- Rp
- c. Dikenakan tarif 20%
- Rp
- d. Dikenakan tarif 30%
- Rp
- e. Dikenakan tarif 40%
- Rp
- f. Dikenakan tarif 50%
- Rp
- g. Dikenakan tarif 60%
- Rp
- h. Dikenakan tarif 75%
- Rp
- i. Ditunda ditangguhkan dan ditanggung Pemerintah
- Rp

Jumlah Penyerahan DN dan Ekspor

Rp

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

PPnBM

- a. Tarif 10%
- Rp
- b. Tarif 20%
- Rp
- c. Tarif 30%
- Rp
- d. Tarif 40%
- Rp
- e. Tarif 50%
- Rp
- f. Tarif 60%
- Rp
- g. Tarif 75%
- Rp
- h. Dikurangi retur penjualan
- Rp
- i. Dikurangi PPnBM ex.Keppres No.56/1988
- Rp

Jumlah PPnBM yang harus disetor

Rp

PPnBM atas Impor

DPP

PPnBM

- a. Tarif 10%
- Rp
- Rp

b. Tarif 20%	Rp	Rp
c. Tarif 30%	Rp	Rp
d. Tarif 40%	Rp	Rp
e. Tarif 50%	Rp	Rp
f. Tarif 60%	Rp	Rp
g. Tarif 75%	Rp	Rp
Jumlah PPnBM atas Impor	Rp	Rp

Jumlah yang kurang/lebih disetor :	
a. PPnBM atas penyerahan dalam negeri	Rp
b. PPnBM atas Impor	Rp
 Jumlah PPnBM yang harus disetor	Rp
PPnBM yang disetor	Rp
 PPnBM yang kurang/lebih disetor	Rp
Denda :	
(Tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :	
- % x bulan x Rp	Rp
 PPnBM yang masih harus dibayar	Rp

8. PBB

9. BPHTB

IV. KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA

1. PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN

1.1 PPh Badan

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	%	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	%	KOREKSI (Rp)	% (4 : 2)
1	2		3		4	5
Penjualan						
HPP						
Laba Bruto						
Biaya Adm dan Umum						
Laba Operasi						
Penghasilan biaya lain						
Penghasilan Netto						
Kompensasi Kerugian						
Penghasilan Kena Pajak						
PPh Terutang						
Kredit Pajak						
PPh Kurang (Lebih) Bayar						
Sanksi Administrasi						
PPh yang masih harus dibayar						

1.2 PPh Pasal 21

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.3 PPh Pasal 22

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.4 PPh Pasal 23

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.5 PPh Final

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.6 PPh Pasal 26

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.7 PPN Tahunan.....
Masa....

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Penyerahan Kena Pajak				
Pajak Keluaran				
Pajak Masukan				
Kelebihan Bulan Lalu				
Kurang (Lebih) Dibayar				
Telah Dibayar				
Kurang Disetor				
Sanksi Administrasi				
Pajak yang masih harus dibayar				

1.8 PPn BM

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
DPP Penyerahan DN & Ekspor				
Penyerahan DN				
Impor				
Sanksi Administrasi				
Pajak yang masih harus dibayar				

1.9 PBB Tahun ###

1.10 BPHTB Tahun ###

2. RATIO KEUANGAN

No.	Jenis Rasio	Menurut SPT	Menurut Pemeriksa	Kode KLU
1.	Laba Bruto Usaha : Peredaran Usaha			
2.	Pengh. Neto DN : Peredaran Usaha			
3.	Laba Usaha : Peredaran Usaha			
4.	Laba Usaha : Aktiva untuk Operasi			
5.	Laba Usaha : Biaya Operasi			
6.	Laba Neto Usaha : Aktiva Untuk Operasi			
7.	Laba Bruto Usaha : Biaya Operasi			

3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPRODUKSI

4. USUL PEMERIKSA

KETUA KELOMPOK
(SUPERVISOR)

.....
NIP.

KEPALA KARIKPA/BIDANG/SUBDIT

.....
NIP.

..... 20
KETUA TIM PEMERIKSA,

.....
NIP.

ANGGOTA TIM PEMERIKSA

.....
NIP.

.....
NIP.

4. Laporan Keuangan disusun/diaudit : ☐ Disusun sendiri
☐ Kantor Akuntan Publik
.....
Nama Akuntan
No. Reg.
Pendapat Akuntan :
5. Pendapat Pemeriksa mengenai pembukuan Wajib Pajak
.....
6. Norma Penghitungan Penghasilan Netto : a. No. KLU
b.% Norma

D. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan : ☐ Dilaksanakan sendiri
☐ Konsultan Pajak
Nama Konsultan Pajak :
No. Surat Izin kerja :
2. Ketaantan Pemasukan SPT
- SPT Tahunan
- PPh WP Orang Pribadi : ☐ Tepat waktu Tgl...
☐ Tidak Tepat waktu Tgl...
☐ Tidak Disampaikan Tgl...
- PPh Pasal 21 : ☐ Tepat waktu Tgl...
☐ Tidak Tepat waktu Tgl...
☐ Tidak Disampaikan Tgl...
- SPT Masa
- PPh Pasal 21 : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Disampaikan ...bulan
- PPN/PPnBM : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Disampaikan ...bulan
3. Ketaatan pembayaran/setoran masa
- PPh Pasal 25 : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Dibayar ...bulan
- PPh Pasal 21 : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Dibayar ...bulan
- PPh Pasal 23 : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Disetor ...bulan
- PPh Pasal 26 : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Disetor ...bulan
- PPN/PPnBM : ☐ Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Tepat waktu ...bulan
☐ Tidak Disetor ...bulan
4. Tunggakan Pajak

NO	NAMA DAN TANGGAL skp DAN STP	JUMLAH TUNGGAKAN	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN
1				
2				
3				
...				

5. Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu
a. No. LPP :
b. Tanggal LPP :

E. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

F. DAFTAR LAMPIRAN

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. GAMBARAN KEGIATAN USAHA

B. GAMBARAN SISTEM AKUNTANSI

--

C. DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAM

NO	NAMA BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG DIPINJAM	KETERANGAN
1		
2		
3		
...		

D. MATERI YANG DIPERIKSA

1. Pemanfaatan Data
2. Objek PPh Orang Pribadi
 - a. Peredaran Usaha
 - b. Harga Pokok Penjualan
 - c. Penghasilan Lain dari Luar Usaha
 - d. Pengurangan Penghasilan Bruto
3. Objek PPh Pasal 21
4. Objek PPh Pasal 23
5. Objek PPh Pasal 26
6. Objek PPN/PPnBM
7. PBB
8. BPHTB
9. Kredit Pajak
10. Kompensasi Kerugian

E. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemanfaatan data/alat keterangan (KKP-Data)

- KP Data-9
- Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan :

- Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau
- Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya Pajak terutang

2. PPh Orang Pribadi

2.1 Peredaran Usaha

(KKP B-1)

Pengujian bersumber dari, misalnya :

- Buku besar penjualan dan faktur penjualan
- Arus piutang atau arus barang
- Equalisasi Peredaran Usaha PPh dengan Penyerahan menurut PPN
- Dan dokumen lainnya (PEB, Bill of Lading, Letter of Credit)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Penjualan ekspor			
Penjualan lokal			
Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.2 Harga Pokok Penjualan

(KKP B-2)

2.2.1 Pembelian bahan baku

(KKP B-2-1)

Pengujian bersumber dari :

- Buku pembelian, faktur pembelian
- Arus hutang atau barang
- Dan dokumen lainnya (PIB)

2.2.2 Persediaan

(KKP B-2-2)

Pengujian bersumber dari :

- Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
- Kartu persediaan
- Arus barang

2.2.3 Penyusutan

(KKP B-2-3)

Pengujian bersumber dari :

- Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
- Dasar aktiva
- Bukti pembelian aktiva

2.2.4 Upah Langsung (KKP B-2-4)

- Pengujian bersumber dari :
- Kas/bank
 - Buku besar biaya
 - Daftar gaji/upah

2.2.5 BPTL lainnya (KKP B-2-5)

- Pengujian bersumber dari :
- Kas/bank
 - Buku besar biaya
 - Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Pembelian bahan baku dan pembantu - Persediaan - Penyusutan - Upah langsung - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3 Pengurangan Penghasilan Bruto (KKP B-3)

2.3.1 Biaya Penjualan (KKP B-3-1)

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Promosi - Biaya Pengemasan - Biaya Perjalanan - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.2 Biaya Umum dan Administrasi (KKP B-3-2)

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Gaji - Alat Tulis - Biaya Listrik - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.3 Biaya lain-lain (KKP B-3-3)

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Bunga - Biaya Administrasi bank - Kerugian dari penjualan/ Perolehan harta - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.4. Penghasilan dari Luar Usaha (KKP B-4)

Pengujian bersumber dari :

- Kas/Bank
- Buku Besar
- Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Biaya Bunga - Dividen - Royalty - Sewa - Keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

3. PPh Pasal 21 (KKP E-1)

Pengujian bersumber dari :

- SPT Masa/Tahunan PPh Pasal 21
- Daftar gaji/upah
- Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Orang Pribadi)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Gaji - Tunjangan - Pesangon - Dan sebagainya			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4. PPh Pasal 23 (KKP E-2)

Pengujian bersumber dari :

- SPT Masa
- Hutang lain-lain
- Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Orang Pribadi)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Dividen - Bunga - Royalty - Sewa - Kerugian dari penjualan/ pengalihan harta - Jasa - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5. PPh Final (KKP E-3)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa
 - Perjanjian Perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
 - Hutang lain-lain di pos neraca
 - Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)
- Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Diskonto/Bunga Obligasi Pengalihan Hak T/B Persewaan Tanah/Bang. Bunga Deposito Tabungan Jasa Giro Diskonto SBI Hadiah Undian Saham dan Obligasi di BEJ Penjualan Saham Pendiri Penj. Saham Modal Ventura Jasa Konstruksi Jasa Pelayaran Dalam Negeri Jasa Pelayaran Penerbangan LN Jasa Penerbangan DN Penghasilan Per. Dagang LN Pola Bagi Hasil Kerjasama Bentuk BOT Revaluasi Aktiva Tetap			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6. PPh Pasal 26 (KKP E-4)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa
 - Perjanjian Perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
 - Hutang lain-lain di pos neraca
 - Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Dividen - Bunga - Royalty - Sewa - Kerugian dari penjualan/ pengalihan harta - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7.

PPN/PPn BM

(KKP E-5)

6.1

PPN Dalam Negeri

(KKP E-5-1)

- Pengujian besumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank
 - Buku penjualan dan pembelian
 - Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
 - Buku Piutang dan hutang
 - Uang muka pada pos neraca
 - Buku penghasilan lain-lain
 - Equalisasi dengan peredaran usaha di PPh Orang Pribadi

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
DPP PPN Keluaran : - Penjualan ekspor - Penyerahan bukan ekspor - Retur penjualan			
Jumlah			
DPP PPN Masukan : - Pembelian impor - Pembelian local - Retur pembelian			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.2.

PPN Jasa Luar Negeri

(KKP E-5-2)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank
 - Buku Penjualan dan pembelian
 - Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
 - Buku Piutang dan hutang
 - Uang muka pada pos neraca
 - Buku Biaya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Royalty - Biaya Jasa, Komisi. - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.3

PPnBM Dalam Negeri

(KKP E-5-3)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank
 - Buku Penjualan dan pembelian
 - Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
 - Buku Piutang dan hutang
 - Uang muka pada pos neraca
 - Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Kendaraan Bermotor - Selain Kendaraan Bermotor - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.4 PPnBM Impor (KKP E-5-4)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT Masa PPN
 - Buku Kas/Bank
 - Buku Penjualan dan pembelian
 - Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
 - Buku Piutang dan hutang
 - Uang muka pada pos neraca
 - Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Kendaraan Bermotor - Selain Kendaraan Bermotor - Dan lain-lain			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8. PBB (KKP E-6)

- Pengujian bersumber dari :
- SPT PBB
 - Buku Kas/Bank

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Tanah - Bangunan - Tanah dan Bangunan			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (KKP E-7)

- Pengujian bersumber dari :
- Buku Kas/Bank
 - Akta Perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
- Tanah - Bangunan - Tanah dan Bangunan			
Jumlah			

Penjelasan koreksi : (didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

10. Kredit Pajak (KKP E-8)

- Pengujian bersumber dari :
- Surat Setoran Pajak (lembar kedua)
 - Bukti pemotongan/pemungutan
 - Konfirmasi kepada Bank Persepsi/PT. POS Indonesia

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
1. PPh Orang Pribadi a. PPh Pasal 21 b. PPh Pasal 22 c. PPh Pasal 23 d. PPh Pasal 24 e. PPh Pasal 25 f. PPh Pasal 26 g. PPh Pasal 29 2. PPh Pasal 21 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 26 5. PPN a. Pajak Masukan Impor b. Pajak Masukan Dalam Negeri c. Pajak Masukan dari masa Pajak yang tidak sama			
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu e. Lain-lain f. Dikurangkan pembayaran Pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA 6. PPnBM 7. PBB 8. BPHTB			
Jumlah			

12. **Kompensasi Kerugian** **(KKP E-10)**
- Uraikan kerugian yang masih boleh dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak yang sedang diperiksa dengan memperhatikan surat ketetapan Pajak atas kerugian tersebut.

III. IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

A. IKHTISAR KOREKSI

1. Objek PPh Orang Pribadi

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Jumlah			

2. Objek PPh Pasal 21

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Jumlah			

3. Objek PPh Pasal 23

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Jumlah			

4. Objek PPh Final

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Jumlah			

5. Objek PPh Pasal 26

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Jumlah			

6. Objek PPN/PPnBM

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
Jumlah			

7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

NO	OBJEK		SPPT	SSP	PENANGGUNG PAJAK
	JENIS	LOKASI			
	JUMLAH				

8. Objek Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
	Jumlah			

B. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG MENURUT PEMERIKSA

NO.	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
1.	PPh Orang Pribadi	
2.	PPh Pasal 21	
3.	PPh Pasal 23	
4.	PPh Pasal 26	
5.	PPN/PPnBM	
6.	PBB	
7.	BPHTB	
	JUMLAH	

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

1. PPh Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak menurut Wajib Pajak	Rp.
Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa	Rp.
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksaan	Rp.
Pengenaan Pajak (tarif Pasal 17 UU PPh 2000) :	
- 5 % x Rp.	= Rp.
- 10 % x Rp.	= Rp.
- 15 % x Rp.	= Rp.
- 25 % x Rp.	= Rp.
- 35 % x Rp.	= <u>Rp.</u>

Jumlah Pajak terutang	=	Rp.
Kredit Pajak	=	<u>Rp.</u>
PPH lebih/kurang bayar	=	Rp.
Sanksi bunga/kenaikan		
- Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983		
.....%.....bulan x Rp.		Rp.
- Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983		
.....%.....bulan x Rp.		<u>Rp.</u>
PPH yang masih harus dibayar		<u>Rp.</u>
2. PPh Pasal 21		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
PPH Pasal 21 yang terutang		Rp.
PPH Pasal 21 yang dibayar		<u>Rp.</u>
PPH Pasal 21 lebih/kurang bayar		<u>Rp.</u>
Sanksi bunga/kenaikan		
- Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983		
.....%.....bulan x Rp.		Rp.
- Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983		
.....%.....bulan x Rp.		<u>Rp.</u>
PPH yang masih harus dibayar		<u>Rp.</u>
3. PPh Pasal 23		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
PPH Pasal 23 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :		
..... % x Rp ##.....		Rp.
PPH Pasal 23 yang disetor		<u>Rp.</u>
PPH Pasal 23 lebih/kurang bayar		<u>Rp.</u>
Sanksi bunga/kenaikan		
- Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983		
.....%.....bulan x Rp.		Rp.
- Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983		
.....%.....bulan x Rp.		<u>Rp.</u>
PPH yang masih harus dibayar		<u>Rp.</u>
4. PPh Pasal 26		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
PPH Pasal 26 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :		
..... % x Rp ##.		Rp.
PPH Pasal 26 yang disetor		<u>Rp.</u>
PPH Pasal 26 lebih/kurang bayar		<u>Rp.</u>
Sanksi bunga/kenaikan		
- Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983		
..... % ## bulan x Rp ##.		Rp.
- Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983		
..... % ## bulan x Rp ##.		<u>Rp.</u>
PPH yang masih harus dibayar		<u>Rp.</u>
5. PPN/PPnBM		
PPN		
- Jumlah Penyerahan Kena Pajak :		DPP
a. Ekspor		Rp.
b. Penyerahan yang PPN-nya ditunda, Ditangguhkan, ditanggung Pernerintah dan lain-lain		Rp.
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut		
- dengan tarif umum 10%		Rp.
- dengan tarif efektif ... %		<u>Rp.</u>
Jumlah Penyerahan Kena Pajak		<u>Rp.</u>
- Jumlah Pajak Keluaran :	DPP	PPN
a. Pajak Keluaran Seluruhnya :		
- dengan tarif umum 10%	Rp.	Rp.
- dengan tarif efektif ... %	Rp.	Rp.
b. Dikurangi retur penjualan	Rp.	Rp.
c. Dikurangi Pajak Keluaran ex. Keppres No. 56/1998	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
Pajak Keluaran yang harus dipungut	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
- Kredit Pajak Pertambahan Nilai.	DPP	PPN
a. Pajak Masukan Impor	Rp.	Rp.
b. Pajak Masukan Dalam Negeri	Rp.	Rp.
c. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama	Rp.	Rp.
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp.	Rp.
e. Lain-lain	Rp.	Rp.
f. Kompensasi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh Bapeksta	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
Jumlah Kredit PPN	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>

Pajak yang kurang/lebih dibayar :		
a. Penyerahan Kena Pajak		Rp.
b. Pajak Keluaran		Rp.
c. Kredit PPN		<u>Rp.</u>
Pajak yang kurang/lebih dibayar		<u>Rp.</u>
d. Denda		
- Pasal 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983	Rp.	
- Pasal 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983	Rp.	
- Pasal 13 (8) UU No. 6 Tahun 1983	<u>Rp.</u>	
		<u>Rp.</u>
PPN yang masih harus dibayar		<u>Rp.</u>
PPnBM		
Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :		DPP
a. Dikenakan tarif 0% (Ekspor)		Rp.
b. Dikenakan tarif 10%		Rp.
c. Dikenakan tarif 20%		Rp.
d. Dikenakan tarif 30%		Rp.
e. Dikenakan tarif 40%		Rp.
f. Dikenakan tarif 50%		Rp.
g. Dikenakan tarif 60%		Rp.
h. Dikenakan tarif 75%		Rp.
i. Ditunda ditangguhkan dan ditanggung Pemerintah		<u>Rp.</u>
Jumlah Penyerahan DN dan Ekspor		<u>Rp.</u>
PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri		PPnBM
a. Tarif 10%		Rp.
b. Tarif 20%		Rp.
c. Tarif 30%		Rp.
d. Tarif 40%		Rp.
e. Tarif 50%		Rp.
f. Tarif 60%		Rp.
g. Tarif 75%		Rp.
h. Dikurangi retur penjualan		Rp.
i. Dikurangi PPnBM ex.Keppres Nomor 56 Tahun 1988		<u>Rp.</u>
Jumlah PPnBM yang harus disetor		<u>Rp.</u>
PPnBM atas Impor	DPP	PPnBM
a. Tarif 10%	Rp.	Rp.
b. Tarif 20%	Rp.	Rp.
c. Tarif 30%	Rp.	Rp.
d. Tarif 40%	Rp.	Rp.
e. Tarif 50%	Rp.	Rp.
f. Tarif 60%	Rp.	Rp.
g. Tarif 75%	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
Jumlah PPnBM atas Impor	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
Jumlah yang kurang/lebih disetor :		
a. PPnBM atas penyerahan dalam negeri		Rp.
b. PPnBM atas Impor		<u>Rp.</u>
Jumlah PPnBM yang harus disetor		Rp.
PPnBM yang disetor		<u>Rp.</u>
PPnBM yang kurang/lebih disetor		Rp.
Denda :		
- Pasal 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983	Rp.	
- Pasal 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983	Rp.	
- Pasal 13 (8) UU No. 6 Tahun 1983	<u>Rp.</u>	
		<u>Rp.</u>
PPnBM yang masih harus dibayar		<u>Rp.</u>

6.

PBB
7.

BPHTB

IV. KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA

1. PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN

1.1 PPh Orang Pribadi

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	%	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	%	KOREKSI (Rp)	% (4 : 2)
1	2		3		4	5
Penjualan						
HPP						
Laba Bruto						
Biaya Adm dan Umum						
Laba Operasi						
Penghasilan Biaya Lain						
Penghasilan Netto						
Kompensasi Kerugian						
Penghasilan Kena Pajak						
PPh Terutang						
Kredit Pajak						
PPh Kurang (Lebih) Bayar						
Sanksi Administrasi						
PPh yang masih harus dibayar						

1.2 PPh Pasal 21

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.3 PPh Pasal 23

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.4 PPh Pasal 26

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Objek Kena Pajak				
PPh Terutang				
Telah Disetor				
PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
Sanksi Administrasi				
PPh yang masih harus dibayar				

1.5 PPN/PPnBM Tahunan.....
Masa....

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Penyerahan Kena Pajak				
Pajak Keluaran				
Pajak Masukan				
Kelebihan Bulan Lalu				
Kurang (Lebih) Dibayar				
Telah Dibayar				
Kurang Dibayar				
Sanksi Administrasi				
Pajak yang masih harus dibayar				

1.6 PBB Tahun

1.7 BPHTB Tahun

2. DATA / INFORMASI YANG DIPRODUKSI

3. USUL PEMERIKSA

KETUA KELOMPOK
(SUPERVISOR)

.....
NIP.

KEPALA KARIKPA/BIDANG/SUBDIT

.....
NIP.

..... 20
KETUA TIM PEMERIKSA,

.....
NIP.

ANGGOTA TIM PEMERIKSA

.....
NIP.

.....
NIP.